

FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2014-2022

Rr. Dian Hardika Pratiwi
rr.dianhardikapratiwi@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the Flypaper Effect on regional expenditures in regencies/cities in Central Sulawesi Province during the 2014–2022 period, with an emphasis on General Allocation Funds (DAU) and Local Own-Source Revenue (PAD). The data source used in this study consists of annual APBD realization reports for all regencies/cities in Central Sulawesi Province, obtained from the website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK). This study involves all regencies/cities in Central Sulawesi Province from 2014 to 2022. The data analysis technique used in this study is Panel Data Regression with E-Views software. The partial test results indicate that DAU has a positive and significant effect on Regional Expenditures with a coefficient value of 0.797, while PAD also has a positive and significant effect with a coefficient value of 0.321. A Flypaper Effect occurs in the DAU and PAD on regional expenditures of regencies/cities in Central Sulawesi Province during the 2014–2022 period based on the partial analysis results, which show that the DAU coefficient value is greater than that of PAD. This means that the higher the General Allocation Fund revenue, the greater the increase in Regional Expenditures. Similarly, the higher the Local Own-Source Revenue, the greater the increase in Regional Expenditures.

Keywords: General Allocation Fund, Local Own-Source Revenue, Regional Expenditures, Flypaper effect

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek Flypaper terhadap belanja daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014–2022, dengan penekanan pada DAU dan PAD. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan realisasi APBD tahunan seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah diperoleh dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian ini melibatkan semua Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun 2014 hingga 2022, Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi Data Panel dengan aplikasi software E-Views. Hasil uji parsial yang diperoleh DAU berpengaruh positif serta signifikan terhadap Belanja Daerah dengan nilai coef 0.797 sedangkan PAD juga berpengaruh positif signifikan dengan nilai coef 0.321 Terjadi flypaper effect pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014–2022 berdasarkan hasil analisis parsial bahwa nilai koefisien DAU lebih besar daripada PAD Artinya semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Umum, maka besaran Belanja Daerah akan semakin meningkat demikian juga halnya dengan PAD semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka besaran Belanja Daerah akan semakin meningkat.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum, Pendapatan asli Daerah, belanja Daerah, Efek Flypaper

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi fiskal di Indonesia telah mengubah pengelolaan keuangan daerah secara signifikan, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah, undang-undang ini memberikan pemerintah daerah kewenangan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya dan keuangan mereka sendiri (Hastuti, P., 2018). Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sangat penting. Ini termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH),

yang bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan belanja daerah (Allya & Rahmawati, 2023). Meskipun pengelolaan dana transfer dan PAD berhasil meningkatkan kapasitas fiskal daerah, masih ada beberapa hambatan, Ini termasuk ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dan pemanfaatan PAD yang tidak optimal. (Mustakim et al.,2024)

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana transfer lainnya merupakan bagian dari pendapatan daerah sendiri, yang kemudian digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Allya & Rahmawati, 2023) Disisi lain, belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah dan pengeluaran lainnya yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi konsumsi, investasi, dan pembayaran transfer. Salah satu tujuan utama belanja daerah adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan berkualitas tinggi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sofhia & Priyambodo ,2024)

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menerapkan kebijakan penggunaan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan mengurangi ketergantungan mereka pada pusat (Fahriani & Syafrudin, 2022). Jumlah PAD yang diterima pastinya berbeda untuk setiap daerah, Jika realisasi PAD suatu daerah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain, itu menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki industri dan sumber daya ekonomi yang cukup. Sebaliknya, jika PAD suatu daerah rendah, daerah tersebut akan bergantung pada DAU. Kondisi ketergantungan tersebut adalah hasil dari efek flypaper. Ini terjadi ketika pemerintah daerah lebih memilih untuk menggunakan dana transfer daripada PAD untuk memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya, PAD tidak berdampak signifikan terhadap belanja daerah atau dampak transfer dana lebih besar daripada PAD terhadap belanja daerah (Kurniati & Devi, 2022).

Berdasarkan PMK No 193/PMK 07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi Sulawesi Tengah termasuk dalam kategori KFD sangat rendah terhadap kemandirian pembiayaan atas daerah sendiri. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang dapat meningkatkan KFD Sulawesi Tengah. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti pendapatan asli daerah yang

rendah, kurangnya pemanfaatan sumber daya alam dan juga belanja pegawai yang semakin tinggi. Pendapatan asli daerah merupakan pemasukan daerah yang dihasilkan dari sumber-sumber milik daerah yang memiliki potensi untuk turut menaikkan perekonomian daerah itu sendiri. Jika daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, memaksimalkan potensi daerahnya, dan menekan angka belanja pegawai daerah maka daerah tersebut akan dapat membiayai daerahnya sendiri yang akhirnya daerah tidak ketergantungan atas transfer dari pusat. (Mustakim et al.,2024). Data Perbandingan PAD terhadap DAU Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 Persentase PAD terhadap DAU Tahun 2022 Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Kab/Kota	PAD	DAU	% PAD terhadap DAU
Kab. Banggai	200,397,947,348	805,938,719,000.00	25%
Kab. Banggai Kepulauan	33,146,420,283	441,263,415,000.00	8%
Kab. Buol	56,401,634,476	477,755,362,000.00	12%
Kab. Tolitoli	96,641,331,281	579,299,327,000.00	17%
Kab. Donggala	66,947,600,429	619,609,701,000.00	11%
Kab. Morowali	358,813,619,102	458,893,660,000.00	78%
Kab. Poso	123,256,431,718	672,294,065,000.00	18%
Kota Palu	281,290,653,457	636,284,819,000.00	44%
Kab. Parigi Moutong	120,626,022,888	720,186,220,000.00	17%
Kab. Tojo Una Una	74,627,280,926	544,410,196,000.00	14%
Kab. Sigi	75,948,476,857	579,175,622,000.00	13%
Kab. Banggai Laut	25,226,852,974	386,229,968,000.00	7%
Kab. Morowali Utara	79,187,447,850	533,286,782,000.00	15%

Sumber : diolah,2024

Data di atas merupakan representasi dari keadaan fiskal pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data diatas, DAU mendominasi aspek pemasukan daerah. Perbandingan antara PAD dan DAU pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar 7% sampai 78%. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih tinggi untuk membiayai belanja daerah. Ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat dapat menyebabkan rendahnya kontribusi pemerintah daerah sendiri dalam mengumpulkan pendapatan dan dapat mempengaruhi kinerja fiskal di tingkat daerah (Rizqullah & Meldona, 2023).

Apabila Dana Perimbangan direspon lebih besar oleh belanja daerah dari pada Pendapatan Asli Daerah maka fenomena ini disebut flypaper effect. Nguyen-Hoang & Yinger (2020) menjelaskan bahwa flypaper effect mengacu pada fenomena di mana bantuan antar pemerintah mempunyai dampak yang lebih besar terhadap permintaan layanan publik dibandingkan dengan jumlah pendapatan rumah tangga

yang setara. Menurut Tasri (2023), fenomena ini ditandai dengan tindakan pemerintah daerah yang berlebihan untuk meningkatkan belanjanya dengan menggunakan Dana Perimbangan daripada menggunakan sumber keuangan yang dapat mereka miliki sendiri. Fenomena flypaper effect dapat terjadi di berbagai tingkat pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam penelitian mereka di beberapa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali dan Jawa, Siddhi dan Dewi (2023) menemukan bahwa ada efek flypaper karena koefisien PAD lebih rendah daripada DAU. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahmatillah et al. (2023) di Provinsi Aceh, dan Awalia et al. (2023) di Kabupaten Kuningan, yang menemukan bahwa koefisien DAU lebih besar dibandingkan PAD yang mengakibatkan terjadinya fenomena Flypaper Effect

Namun, beberapa peneliti menyatakan hasil sebaliknya, Sofhia & Priyambodo (2024) yang melakukan penelitian di Kota Mataram memperoleh hasil bahwa tidak terdapat Flypaper Effect karena hasil uji menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan DAU. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Rizqullah & Meldona (2023) yang meneliti di Kota Bima memperoleh hasil bahwa tidak terdapat Flypaper Effect pada Kota Bima. Selanjutnya, Kurniati & Devi (2022) juga melakukan penelitian mengenai Flypaper Effect di seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Lampung memperoleh hasil bahwa tidak terjadi Flypaper Effect karena pemerintah daerah lebih banyak menggunakan PAD dibandingkan DAU untuk belanja daerah.

Meskipun telah banyak penelitian dilakukan tentang Efek Flypaper di berbagai daerah di Indonesia, Berdasarkan kajian empiris dari beberapa peneliti terdahulu yang menganalisis dan menguji tentang Flypaper Effect di berbagai daerah menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif, Selain itu, pentingnya dilakukan penelitian mengenai fenomena ini dikarenakan apabila Flypaper Effect terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan banyak masalah yang lebih kompleks, seperti tidak maksimalnya pemanfaatan sumber-sumber penghasil pendapatan daerah. Pemerintah daerah menjadi sangat tergantung pada pemerintah pusat karena penerimaan daerah rendah, ketimpangan fiskal, dan respons yang berlebihan terhadap Dana Transfer. Pada akhirnya, ini menyebabkan pemerintah kabupaten/kota menjadi tidak mampu berdiri sendiri secara keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efek Flypaper terhadap belanja daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama periode 2014–2022, dengan penekanan pada DAU dan PAD. Diharapkan

penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah dan memberikan saran kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menjabarkan hubungan antara pihak stakeholder atau principal dengan agent, dimana prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen. Prinsipal memberikan tanggungjawab kepada agen dalam bentuk perjanjian yang kemudian disepakati oleh kedua pihak dan saling menguntungkan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga bisa diterapkan pada sektor publik, dimana pemerintah daerah memiliki hubungan keagenan dengan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Dan juga pemerintah daerah wajib memaksimalkan kesejahteraan didaerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang didapat dari pendapatan APBN yang dialokasikan atau diberikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana bagi daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan mendapat alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang mempunyai potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan mendapat alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. DAU merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Mardiasmo, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang didapat berdasarkan keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Menurut UU No.23 tahun 2014 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat daerah berdasarkan peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri didapat daripajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda. Jika suatu daerah memiliki kemajuan dalam bidang industri dan memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, maka daerah tersebut cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari daerah lainnya. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (Halim, 2007).

Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran kas daerah yang menjadi biaya yang dikeluarkan oleh daerah dalam satu periode tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 Belanja daerah merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan program dan kegiatan belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Halim, 2007)

Flypaper Effect

Terdapat dua teori yang dapat menjelaskan fenomena flypaper effect ini, yang pertama adalah model birokratik (*bureaucratic model*) yang melihat dari perspektif birokrat dan yang kedua adalah ilusi fiskal (*fiscal illusion model*) yang melihat dari perspektif masyarakat (Kuncoro,2007). Menurut Badrudin (2012:7), flypaper effect adalah adanya perbedaan dalam pola pengeluaran yang tergantung sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan yang berasal dari usaha sendiri dengan pendapatan transfer dari pihak lain. *Flypaper effect* merupakan suatu kondisi keuangan pemerintah daerah yang membelanjakan

lebih banyak dan lebih boros dengan menggunakan dana alokasi umum dibandingkan dengan menggunakan dana sendiri atau pendapatan asli daerah . Flypaper effect adalah fenomena yang terjadi pada daerah dimana daerah merespon lebih banyak dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerahnya sendiri dalam hal pembiayaan belanja daerah. Flypaper effect dibuktikan dengan tingginya koefisien dana transfer dibandingkan pendapatan asli daerah dalam hasil pengujian (Maimunah, 2006).

Hipotesis

H₁: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

H₂: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

H₃: Terjadi flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif dan waktu penelitian tahun 2014-2022, menggunakan data sekunder berupa Laporan realisasi APBD tahunan seluruh kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Tengah total 12 Kabupaten dan 1 Kota yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan menggunakan metode data panel. Adapun data dalam penelitian ini berjumlah 117 data, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2022. Alat bantu dalam mengelolah data dengan menggunakan program *evIEWS*. Tahapan dan prosedur dalam mencapai tujuan penelitian ialah dengan melakukan uji permodelan data panel (CEM, FEM dan REM), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi), dan terakhir uji hipotesis (uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi (R-square)).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan untuk regresi data panel adalah *evIEWS*. Aplikasi tersebut memudahkan analisis data panel jika dibandingkan aplikasi lainnya. Analisis data menggunakan

transformasi logaritma natural (Ln) agar seluruh uji asumsi klasik terpenuhi. Analisis regresi data panel dimulai dengan pemilihan metode atau teknik analisis terbaik.

Tabel 2 Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.597931	(12,102)	0.0000
Cross-section Chi-square	50.589414	12	0.0000

Sumber : diolah, 2024

Uji Chow dilakukan untuk mengonfirmasi apakah teknik regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dari model regresi data panel dengan Common Effect Model (CEM). Adapun hipotesis dari Uji Chow adalah sebagai berikut:

H₀ : Menggunakan Common Effect Model (CEM)

H₁ : Menggunakan Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai P-Value (Prob) Chi-Square adalah $0.000 < 0.05$ sehingga H₀ ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data lebih baik menggunakan Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.803011	2	0.0002

Sumber ; diolah, 2024

Uji Hausman dilakukan untuk mengonfirmasi model mana yang terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM) yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Hipotesis dari uji Hausman adalah sebagai berikut:

H₀ : Menggunakan Random Effect Model (REM)

H₁ : Menggunakan Fixed Effect Model (FEM)

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai P-Value (Prob) Chi-Square adalah $0.000 < 0.05$ sehingga ditolak. Dapat disimpulkan bahwa data lebih baik menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil uji chow dan uji haussman, diperoleh hasil bahwa **data lebih baik dianalisis dengan menggunakan Fixed Effect Model** sehingga tidak perlu dilakukan uji lagrange multiplier. Hal ini turut

dilakukan pada penelitian sebelumnya dimana ketika Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan model terbaik adalah FEM, maka tidak perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier (Bakhta & Rahmawati, 2024)

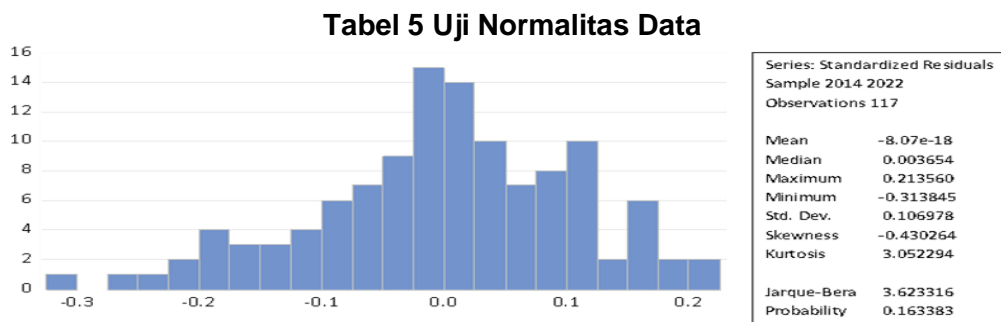
Tabel 4 Hasil Pengujian Teknik Analisis terbaik

No	Metode	Pengujian	Hasil
1	Uji Chow	CEM vs FEM	Fixed Effect Model
2	Uji Hausman	FEM vs REM	Fixed Effect Model
Model yang terpilih			Fixed Effect Model

Sumber ; diolah,2024

Uji Asumsi Normalitas Data

Pengujian jenis asumsi klasik ini dilakukan dengan menggunakan uji Jarque-Bera. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah residual berdistribusi normal adalah dengan membandingkan nilai P-value dengan tingkat signifikansi 0.05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai P-Value > 0.05 maka nilai residual berdistribusi normal dan jika P-Value bernilai < 0.05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Berikut hasil perhitungan uji normalitas residual.



Sumber : diolah ,2024

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diketahui bahwa P-Value memiliki nilai sebesar $0.163 > 0.05$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data residual model regresi berdistribusi normal. Melalui hasil tersebut maka asumsi normalitas residual terpenuhi. Adapun grafik residual turut berbentuk seperti bell curve/terdistribusi secara normal.

Uji Heteroskedastisitas

Suatu model regresi yang baik harus memiliki sifat homoskedastisitas dimana nilai rata-rata residual harus berada pada titik 0. Cara untuk mengonfirmasi uji ini adalah dengan menggunakan tekni uji glejser.Dasar pengambila keputusan Uji Glejser adalah dengan membandingkan nilai P-Value dengan

nilai signifikansi ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai P-value lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil perhitungan dari Uji Glejser.

Tabel 6 uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.598009	1.346240	1.929825	0.0564
LND AU	-0.098382	0.055351	-1.777400	0.0785
LNPAD	0.005862	0.017679	0.331569	0.7409

Sumber : diolah ,2024

Berdasarkan hasil perhitungan Uji Glejser diatas dapat dikatakan, DAU dan PAD memiliki P-Value > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi yang dibangun, dengan kata lain uji asumsi untuk heteroskedastisitas terpenuhi

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai Tolerance. Jika nilai Tolerance < 0.10 atau nilai VIF > 10 maka terdapat indikasi multikolinearitas pada model regresi yang dibangun. Tabel di bawah ini menyajikan hasil uji multikolinearitas.

Tabel 7 uji multikolinearitas

	LND AU	LNPAD
LND AU	1	0.67072092...
LNPAD	0.67072092...	1

Variabel	VIF
LND AU	$\frac{1}{(1 - R^2)} = \frac{1}{(1 - 0.670^2)} = 1.81$
LNPAD	$\frac{1}{(1 - R^2)} = \frac{1}{(1 - 0.670^2)} = 1.81$

Sumber : diolah, 2024

Nilai VIF dapat dihitung dengan menggunakan rumus $VIF = 1 / (1 - R^2)$ Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai VIF yang diperoleh bernilai < 10.00 (1.81) sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada multikolinearitas yang terjadi pada model regresi panel yang dibangun. Dengan kata lain, asumsi tidak terdapat multikolinearitas terpenuhi.

Uji Autokorelasi

Analisis uji asumsi autokorelasi dalam regresi bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat pola dalam residual (kesalahan) dari model regresi yang dapat mengindikasikan adanya hubungan antara nilai residual pada waktu yang berbeda. Autokorelasi terjadi ketika residual dari model regresi tidak independen satu sama lain, yang bisa mempengaruhi validitas hasil regresi.

Tabel 8 uji Autokorelasi

Mean dependent var	27.65883
S.D. dependent var	0.364644
Akaike info criterion	-1.384562
Schwarz criterion	-1.030438
Hannan-Quinn criter.	-1.240792
Durbin-Watson stat	1.805707

Sumber ; diolah 2024

Nilai Durbin-Watson akan diperoleh dengan syarat $dL < dw < (4-dU)$. Berdasarkan jumlah variabel independen (2) dan jumlah sampel (117) pada penelitian, maka diperoleh nilai $dL = 1.6638$ dan $dU = 1.7332$ dan $4-dU = 2.2668$. Maka dapat disampaikan bahwa nilai durbin watson berada diantara dL dengan $(4-dU)$, $1.6638 < 1.805 < 2.2668$. Dengan kata lain, asumsi tidak ada autokorelasi terpenuhi.

Uji Hipotesis

Tabel 9. Uji F (simultan)

R-squared	0.913930
Adjusted R-squared	0.902117
S.E. of regression	0.114084
Sum squared resid	1.327535
Log likelihood	95.99690
F-statistic	77.36323
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : diolah 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 77,363 dengan tingkat signifikansi 0,0000 dan nilai F tabel sebesar 3,08 ($F(n-k,k-1)=F(117-3,3-1)=F(114,2)$). Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen X1 (PAD) dan X2 (DAU) secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Y (Belanja Daerah). Bukti ini diperkuat dengan nilai F hitung ($77,363 > F$ tabel (3,08) dan signifikansi ($0,0000 < 0,05$).

Tabel 10.Uji T (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.950503	2.450139	-0.796078	0.4278
LND AU	0.797067	0.100739	7.912203	0.0000
LNPAD	0.321257	0.032175	9.984778	0.0000

Sumber : diolah 2024

Berdasar pada tabel hasil uji parsial diatas, kita dapat menganalisis hasil t-statistik sebagai berikut:

- 1) Variabel X2 (PAD) terhadap Y (Belanja Daerah) Dari hasil pengujian, Variabel X2 (PAD) mempunyai dampak positif dan signifikan pada variabel belanja daerah. Ini dapat dibuktikan oleh nilai coef =0.321, nilai t-hitung 9.98 > t tabel $t(n-2)=t(115)=1.98$, serta nilai prob 0.000 < 0,05.
- 2) Variabel X1 (DAU) pada Y (Belanja Daerah) Dari hasil pengujian, Variabel X1 (DAU) mempunyai dampak positif serta signifikan pada variabel belanja daerah. Ini dapat dibuktikan oleh nilai coef = 0.797, nilai t-hitung 7.91 > t tabel $t(n-2)=t(115)=1.98$, serta nilai prob 0.000 < 0,05.

Dari temuan analisis didapat model persamaan regresi sebagaimana dibawah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

$$Y = -1.950 + 0.797 * X_1 + 0.321 * X_2 + \epsilon$$

Yang dapat dipaparkan sebagaimana dibawah ini:

1. Ketika keseluruhan variabel penelitian bernilai konstant atau 0, maka variabel belanja daerah akan bernilai -1.95
2. Tiap peningkatan satu unit pada variabel DAU, dengan variabel lain dianggap tetap atau memiliki nilai konstan atau 0, akan menyebabkan peningkatan pada variabel belanja daerah sekitar 0.797.
3. Tiap kenaikan satu satuan pada variabel PAD, serta variabel lain mempunyai nilai konstan atau 0, dengan demikian akan terjadi kenaikan pada variabel belanja daerah sebesar 0.321.

Tabel 11.Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.913930
Adjusted R-squared	0.902117
S.E. of regression	0.114084
Sum squared resid	1.327535
Log likelihood	95.99690
F-statistic	77.36323
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber ; diolah 2024

Berdasarkan hasil analisis data, nilai R-Squared sebesar 0,902 menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu X1 (DAU) dan X2 (PAD), mampu menjelaskan sebesar 90,2% dari variasi atau

perubahan pada variabel Y (Belanja Daerah). Sisanya, sebesar 9,8%, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji Flypaper Effect

Analisis flypaper effect. Maimunah (2006 : 30) mengemukakan syarat terjadi flypaper effect adalah 1.) apabila efek (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek PAD dan keduanya sama-sama signifikan, atau 2.) PAD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect. Berdasarkan hasil analisis parsial dapat disampaikan bahwa nilai koefisien DAU > PAD ($0.797 > 0.321$), sehingga dapat disampaikan bahwa terjadi flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil analisis parsial, diketahui bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu 0,797 berbanding 0,321. Perbandingan ini menunjukkan bahwa di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terjadi fenomena Flypaper Effect, di mana pengaruh dana transfer dari pemerintah pusat, dalam hal ini DAU, lebih dominan dalam memengaruhi belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih bergantung pada dana dari pusat untuk membiayai pengeluarannya, ketimbang memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Flypaper effect di Sulawesi Tengah dapat berdampak pada rendahnya insentif daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dan inovasi fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi PAD.

Pembahasan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini, hipotesis pertama (H1) diterima karena nilai coef = 0.797, nilai t-hitung 7.91 > t tabel 1.98, serta nilai prob 0.000 < 0,05. nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0,005), atau sig. < α . Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan kata lain, setiap peningkatan DAU secara langsung akan diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah. Hubungan ini bersifat proporsional, di mana semakin besar jumlah DAU yang diterima oleh

pemerintah daerah, semakin besar pula anggaran yang dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan belanja, seperti layanan publik, infrastruktur, dan program pembangunan lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung pada DAU untuk membiayai pengeluarannya, sehingga peningkatan transfer dari pusat cenderung memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap DAU juga dapat memunculkan tantangan, karena daerah mungkin menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemandirian fiskalnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmatillah et al. (2021) dan Allya & Rahmawati (2023) dan Rizqullah & Meldona (2023) juga yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah yang membuktikan bahwa apabila besaran alokasi Dana Alokasi Umum meningkat, maka besaran alokasi Belanja Daerah akan ikut meningkat.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis Kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil uji t dalam penelitian ini, diketahui bahwa hipotesis kedua (H2) diterima karena nilai $\text{coef} = 0.321$, nilai $t\text{-hitung} = 9.98 > t\text{ tabel} = 1.98$, serta nilai $\text{prob} = 0.000 < 0,05$. signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah tingkat signifikansi $\alpha (0,005)$, yaitu $\text{sig.} < \alpha$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dengan kata lain, setiap peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan Belanja Daerah. Hubungan ini bersifat linear, di mana semakin besar PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah, semakin besar pula alokasi yang dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan belanja publik. Kondisi ini mencerminkan bahwa kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dapat berdampak langsung pada peningkatan kapasitas belanja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ini juga berarti bahwa peningkatan efisiensi pengelolaan PAD berpotensi memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Allya & Rahmawati (2023) dan Kurniati & Devi (2022) dan Rahmatillah et al.(2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya, ketika pemerintah daerah dapat meningkatkan realisasi PAD, maka besaran alokasi Belanja Daerah akan ikut meningkat.

Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah

Hipotesis Ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa Terjadi flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil analisis parsial, diketahui bahwa nilai koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu 0,797 berbanding 0,321. Perbandingan ini menunjukkan bahwa di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah terjadi fenomena Flypaper Effect, di mana pengaruh dana transfer dari pemerintah pusat, dalam hal ini DAU, lebih dominan dalam memengaruhi belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih bergantung pada dana dari pusat untuk membiayai pengeluarannya, ketimbang memaksimalkan pendapatan dari sumber-sumber lokal. Flypaper effect di Sulawesi Tengah dapat berdampak pada rendahnya insentif daerah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan PAD dan inovasi fiskal. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengurangi ketergantungan ini dan mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi PAD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sidhi & Dewi (2023) dan Rahmatillah et al.(2021) menyatakan bahwa Besaran alokasi Dana Alokasi Umum lebih mendominasi dalam kebijakan Belanja Daerah daripada Pendapatan Asli Daerah. Belanja Daerah lebih merespon Dana Alokasi Umum daripada Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Sofhia & Priyambodo (2024) dan Rizqullah & Meldona (2023) dan Kurniati & Devi (2022) hasil penelitiannya menemukan tidak terdapat fenomena flypaper effect, disebabkan transfer dari pemerintah pusat tidak memberikan efek ketergantungan kepada pemda, terkhusus DAU yang nantinya digunakan untuk pembiayaan belanja daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti mengenai fenomena flypaper effect memberikan hasil yang berbeda-beda, hal tersebut dikarenakan setiap daerah itu memiliki karakteristik yang beragam dan tidak sama, baik dari segi ekonominya, keadaan geografi serta demografi, juga kondisi lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

- 1) Hipotesis pertama diterima, yakni Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan Dana Alokasi Umum, maka besaran Belanja Daerah akan semakin meningkat.
- 2) Hipotesis kedua diterima, yakni Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Artinya semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, maka besaran Belanja Daerah akan semakin meningkat.
- 3) Hipotesis ketiga diterima, yakni terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 – 2022.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa keterbatasan, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah agar menggali potensi daerahnya seperti intensifikasi penerimaan pajak daerah dan meminimalisir penggunaan dana perimbangan sehingga terciptanya daerah otonom yang mandiri.
- 2) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang berbeda dengan penelitian ini seperti menggunakan data dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, agar adanya keterbauran data dan dapat mengetahui bagaimana pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
- 3) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel lain seperti dana alokasi khusus dan dana bagi hasil, agar dapat diketahui variabel lain yang dapat mempengaruhi belanja daerah pada Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Allya, H. R., & Rahmawati, F. (2023). Flypaper effect pada pendapatan daerah terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 235-249.
- Awalia, N. P., Arifin, A., Alfarisy, M. F., & Yaramai, J. Y. (2023). Flypaper Effect Analysis of General Allocation Fund and Local Own-Source Revenue on Expenditures in Kuningan Regency 2006–2020. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 18(1).
- Badrudin, R. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta
- Bakhta, A. F. A., & Rahmawati, I. D. (2024). Pengaruh Faktor-Faktor Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Kesehatan: BEI 2017-2021. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 20. <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i3.271>
- Fahriani, F., & Syafrudin, R. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Serta Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 5(1), 42-52.

- Ghozali, I. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 21. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Simposium Nasional Keuangan Negara: Kementerian Keuangan RI Tahun 2018, 784-799.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Kuncoro, H. (2007). Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X, 1-29.
- Kurniati, H., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 7(2), 187-208.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Pulau Sumatra. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mustakim, F., Suasa, S., & Nawawi, M. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 1(6), 281-290.
- Nguyen-Hoang, P., & Yinger, J. (2020). The Flypaper Effect: Methods, Magnitudes, and Mechanisms. *Journal of Education Finance*, 46(2), 158–188.
- Rahmatillah, Marzuki, Ghazali Syamni, & Nurlela. (2023). Analysis Of the Flypaper Effect and Its Influence on District/City Regional Expenditures in Aceh Province 2016-2021. *Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets*, 1(3), 244–253.
- Rizqullah, A., & Meldona, M. (2023). Analisis flypaper effect dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui mediasi belanja daerah. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 832-842.
- Sidhi, P. D. I. (2023). Pengaruh Flypaper Effect terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Bali dan Jawa tahun 2019-2021 (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Sofhia, S., & Priyambodo, V. K. (2024). Flypaper Effect pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah di Kota Mataram. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(3), 839-849.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta. Sugiyono
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung : Alfabeta.
- Tasri, A. (2023). The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia. *European Journal of Formal Sciences and Engineering*, 6(2), 137-144.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.